

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### B. Pasal tentang Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. (Kompilasi Hukum Islam, bab 1, pasal 171 huruf a). Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. (Kompilasi Hukum Islam, bab 1, pasal 171 huruf b). Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. (Kompilasi Hukum Islam, bab 1, pasal 171, huruf c). Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. (Kompilasi Hukum Islam, bab 1, pasal 171, huruf d). Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. (Kompilasi Hukum Islam, bab 1, pasal 171, huruf d).<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta, 2004), hal. 195.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Waktu Pembagian Harta Warisan dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam

Memperhatikan beberapa pasal yang ada dalam kompilasi hukum Islam yang berkaitan tentang hukum kewarisan, bahwa:<sup>2</sup>

- a. Secara umum kewarisan atau waris yang disebut oleh Kompilasi Hukum Islam serupa dengan *faraidh* yang tertuang dalam kitab atau referensi *turats* atau buku-buku klasik.
- b. Secara umum dapat dikatakan bahwa ketentuan mengenai hukum kewarisan yang diatur dalam KHI berpedoman pada garis-garis hukum *faraidh*. Penggunaan asas *qath'i* lebih mendominasi perumusannya, dan seluruhnya hampir didasarkan pada garis rumusan *nash* yang terdapat dalam Al-Qur'an.
- c. KHI tidak mengadopsi ketentuan hukum adat yang menyamakan hak dan kedudukan anak angkat dengan status anak kandung. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 171 huruf h.
- d. Bagian anak laki-laki dan anak perempuan tidak mengalami reaktualisasi. Kepastian ini berpegang pada *nash* Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Memositifkan Abstraksi Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos, 1999), hal. 66.

<sup>3</sup> Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separuh harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Penertiban warisan bagi anak yang belum dewasa. Sebelum adanya Kompilasi Hukum Islam, belum ada penertiban di kalangan masyarakat Islam atas perolehan harta warisan yang diterima anak yang belum dewasa. Pengurusan dan pemeliharannya diserahkan berdasarkan kepercayaan saja kepada salah seorang kerabat tanpa pengawasan dan pertanggungjawaban. Akhirnya ketika si ahli waris anak sudah dewasa warisan yang harusnya diberikan kepadanya sudah lenyap dihabiskan oleh pemelihara.

Selain dari pada itu, untuk bisa sampai pada titik permasalahan yang menjadi objek penelitian dalam tulisan ini, maka penulis mencoba untuk menganalisa lebih dalam terkait dengan beberapa pasal yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal-pasal yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam yang membicarakan tentang waktu pembagian harta warisan tidak dijumpai oleh penulis yang menyebutkan secara terang-terangan terkait masalah yang sedang akan dikaji oleh penulis. Kendatipun demikian, apabila memperhatikan terhadap pasal yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam, hemat penulis secara eksplisit terdapat indikasi tentang penjelasan mengenai waktu pembagian harta warisan, keterangan ini bisa dijumpai pada pasal 171 tentang ketentuan umum pada point (e) dengan keterangan sebagai berikut:

---

*(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tahjiz*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat. Melalui pasal yang telah disebutkan penulis sebelumnya, maka, dapat dipahami bahwa Kompilasi Hukum Islam memberikan keterangan terkait dengan waktu pembagian harta warisan dapat dilakukan setelah pelaksanaan pelunasan hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan semisal penyelenggaraan jenazah, membayar utang piutang, dan wasiat.

Keterangan yang sama dengan permasalahan yang disebutkan penulis ini juga dapat dipahami dalam penjelasan berikutnya yang dikemukakan oleh Kompilasi Hukum Islam pada pasal 175 Ayat (1), kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

- a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.

Menurut Ahmad Rofiq, yang dimaksud dengan biaya perawatan jenazah adalah meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan sejak orang tersebut meninggal dunia, dari biaya memandikan, mengkafani, mengantar (mengusung) jenazah dan menguburkannya. Besarnya biaya tidak boleh terlalu besar (karena bisa mengurangi hak ahli waris) dan juga tidak boleh terlalu kurang



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(karena mengurangi hak si mayit), tetapi dilaksanakan secara wajar.<sup>4</sup>

- b. Menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.

Sedangkan yang dimaksud dengan pelunasan utang yaitu pelunasan utang-utang mutlaqah.<sup>5</sup> Utang tersebut berkaitan langsung dengan tirkah, sekalipun tidak dihabiskannya, baik utang-utang ini berupa utang kepada Allah atau utang kepada sesama manusia. Setelah pembiayaan perawatan jenazah dan pelunasan utang-utang yang berkaitan dengan wujud harta peninggalan dikeluarkan barulah utang-utang yang berkaitan dengan tanggungan si mayit ditunaikan, baik utang kepada Allah maupun utang kepada sesama manusia.<sup>6</sup>

- c. Menyelesaikan wasiat pewaris.

Wasiat adalah tindakan seseorang menyerahkan hak kebendaannya kepada orang lain yang berlaku apabila yang berwasiat meninggal dunia. Wasiat merupakan tindakan yang sifatnya suka rela tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Apabila seseorang meninggal dunia dan semasa hidupnya berwasiat atas sebagian harta kekayaannya kepada suatu badan atau seseorang,

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris Edisi Revisi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001, Cet-4), hal. 47.

<sup>5</sup> Utang mutlaqah yaitu utang-utang yang tidak berkaitan dengan wujud harta peninggalan, tetapi berkaitan langsung tanggungan si mayit.

<sup>6</sup> Komite Fakultas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004, Cet-1), Hal. 72.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka wasiat itu wajib dilaksanakan sebelum harta peninggalannya dibagikan pada ahli warisnya.<sup>7</sup>

- d. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

Keterangan di atas, dapat menyampaikan penulis pada kesimpulan bahwa, ada suatu kewajiban yang ditetapkan oleh Kompilasi Hukum Islam untuk membagi harta warisan, hal ini sebagaimana terdapat dalam point (d) dalam pasal 175, kewajiban untuk membagi harta warisan yang telah disebutkan tentunya tidak bisa akan terselenggarakan jika waktu untuk membaginya tidak terukur secara pasti. Untuk menentukan waktu yang tertentu, tentunya penulis mencoba untuk menganalisa dari kalimat-kalimat yang tersimpan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut. Oleh karena demikian, pada akhir kesimpulan yang bisa disebutkan oleh penulis, bahwa Kompilasi Hukum Islam menetapkan tahapan-tahapan untuk melakukan proses pembagian harta warisan, dan tahapan inilah yang pada akhirnya dianggap oleh penulis sebagai waktu untuk melakukan pembagian harta warisan. Walaupun waktu yang disebutkan belum bisa memberikam angka yang pasti, semisal 10 hari setelah kematian dan atau lebih, akan tetapi penulis memahami bahwa, Kompilasi hukm Islam menginginkan agar segera mungkin untuk melakukan proses pembagian harta warisan.

<sup>7</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris Edisi Revisi...*, Hal. 52-53.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Waktu Pembagian Harta Warisan dalam Pandangan Ulama Fikih

Pandangan ulama fikih mengenai permasalahan terkait, karena pada dasarnya Kompilasi Hukum Islam ini lahir dari kumpulan beberapa kitab fikih. Penelusuran penulis ke beberapa kitab klasik ditemukan bahwa ulama fikih tidak menyebutkan secara *sharih* (terang-terangan) mengenai ketentuan waktu pembagian harta warisan. Akan tetapi apabila dipahami secara tersirat, maka akan dijumpai keterangan terkait kapan waktu pembagian harta warisan harus dilakukan.

Berbicara mengenai waktu pembagian harta warisan, tentu tidak terlepas dari konteks ayat-ayat yang menjelaskan mengenai kewarisan. Apabila ditelusuri di penghujung ayat kewarisan, selalu akan dijumpai dengan kalimat “*sesudah wasiat yang diwasiatkan atau hutang*” hal tersebut merupakan pernyataan bahwa bagian harta warisan diberikan kepada ahli waris sesuai dengan *nashib* atau *furudh* yang ditentukan setelah sebelumnya utang dan wasiat di penuhi<sup>8</sup>. Dua kewajiban tersebut disepakati oleh semua ulama sehingga tidak menimbulkan perbedaan pendapat dalam keharusan menyelesaikan wasiat dan utang sebelum membagi harta warisan.

Kendatipun demikian, dalam Al-Qur'an urutan penyebutan wasiat didahulukan dari pada utang, namun para ulama sepakat bahwa bahwa dalam pelaksanaannya utang didahulukan atas wasiat. Alasan

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 63.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ulama dalam menentukan hal tersebut adalah karena hukum wajib untuk pelunasannya sudah ada sejak awal, karena hal tersebut merupakan tanggung jawab. Adapun mengenai wasiat pada awalnya adalah sukarela dan tidak mengikat.

Penjelasan yang telah diuraikan penulis di atas dapat memberikan suatu kesimpulan bahwa waktu awal untuk melaksanakan pembagian warisan dalam pandangan fikih adalah dilakukan ketika meninggalnya pewaris hingga pelunasan utang piutang dan wasiat selesai dilaksanakan. Muhammad Hasbi Ash-Shidiqi menjelaskan bahwa kesepakatan ulama terkait harta peninggalan yang sudah terlepas dari hutang secara otomatis akan beralih menjadi milik ahli waris sejak saat orang yang meninggal tau pewaris meninggal dunia.<sup>9</sup> Kewajiban untuk melaksanakan pembagian harta warisan dapat dilakukan setelah proses hak-hak yang berkenaan dengan harta pembagian selesai dilakukan.

### **3. Waktu Pembagian Harta Warisan yang Diaplikasikan Masyarakat Indonesia**

Kemajemukan Negara Indonesia, tentunya menyebabkan keberagaman pola pikir dalam berbagai hal, termasuk dalam proses pembagian harta warisan, praktek yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia terkait waktu pembagian harta warisan tentunya sangat beragam. Dalam pembahasan ini, penulis mencoba untuk

<sup>9</sup>Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fikih Mawaris*, (Semarang: PT Pustaka Riski Putra), hal. 23.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengetengahkan permasalahan tersebut untuk memberikan informasi yang didapat terkait praktek pembagian harta warisan. Dari beberapa referensi yang ditelusuri penulis, didapati bahwa beberapa daerah seperti di Riau bahwa praktek pemberlakuan waktu pembagian harta warisan tidak ditetapkan secara eksplisit dalam aturan adat istiadat.

Masyarakat muslim di Indonesia belum tentu mengamalkan hukum Islam secara kaffah (penuh), karena menurut Sidi Gazalba<sup>5</sup> yang melaksanakan hukum Islam secara kaffah adalah masyarakat Islam, bukan masyarakat muslim. Karena masyarakat muslim itu adalah kelompok manusia yang beragama Islam atau mengaku beragama Islam, tetapi masih banyak mengamalkan kebudayaan, mungkin juga masih baru mendekat ajaran Islam, bahkan mungkin terdapat hukum Islam dijahuihnya.<sup>10</sup>

Beda halnya dengan di daerah penghujung Indonesia, dari penelusuran penulis melalui media internet yang ada ke beberapa yang menjadi wilayah provinsi Aceh, ditemukan waktu pembagian harta warisan yang dipraktekkan oleh masyarakat setempat dapat dijabarkan sebagai berikut ini:

Aceh Besar misalnya yang merupakan daerah paling dekat dengan ibu kota Aceh, dan masyarakatnya masih sangat kental dengan kebudayaannya karena belum terpengaruh oleh pembauran antara budaya lainnya, dari keterangan beberapa toloh yang dapat penulis

<sup>10</sup> H.A. Djazuli, Al Majalah AlAhkam Al Adliyah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam, (Bandung : Kiblat Press, 2002), hal 370.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungi dan dapatkan datanya bahwa, dalam praktek pembagian harta warisan ditemukan keragamannya, semisal masyarakat Lam Tuba, Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar membagi harta warisannya ketika selesai hari keseratus meninggalnya pewaris atau pemilik harta, hal ini dipraktekkan mengingat bahwa dalam adat istiadat masyarakatnya ditemukan adanya semacam “kenduri” atau dalam istilah Indonesianya doa selamatan yang bertujuan mendoakan roh arwah pemilik harta yang telah meninggal dunia. Pada hari keseratus ini, semua ahli waris berkumpul dan pulang kampung untuk mengadakan doa selamatan, karena berkumpulnya seluruh ahli waris, maka disininya terjadinya musyawarah untuk membagi harta warisan sebagai peninggalan dari almarhum atau almarhumah yang telah meninggal dunia.

Gambaran tentang praktek pembagian harta warisan yang telah disebutkan di atas tentu berbeda kalau dibandingkan dengan wilayah lain yang ada dalam Negara Indonesia, sebagai contoh Riau, dimana daerah ini merupakan tempat tinggal penulis. Dalam ketentuan yang ada di beberapa daerah. Sebagai contoh di Kabupaten Kampar bahwa ditemukan dalam prakteknya untuk pembagian harta warisan bertumpu pada aturan yang ditetapkan oleh ninik mamak, artinya ketentuan waktu untuk mempraktekkan pembagian harta warisan itu sangat terikat dengan aturan yang ditetapkan oleh pemangku adat yang ada di daerah setempat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lain halnya dengan beberapa daerah lain yang sudah agak bercampur baur masyarakatnya, artinya masyarakat yang ada di tempat tersebut sudah bersentuhan dengan adat-adat daerah, contoh Pekanbaru yang merupakan pusat kota dan juga termasuk ibu kota Riau, daerah ini terkait dengan waktu pembagian harta warisan sudah sangat terkontaminasi oleh budaya-budaya daerah lain, bahkan dalam penelusuran penulis, penulis tidak menjumpai waktu secara pasti yang ditetapkan di daerah setempat, artinya ketetapan waktu untuk melakukan pembagian harta warisan tidak ada, makanya dalam prakteknyapun tidak dijumpai suatu waktu yang pasti untuk membagi harta warisan

**B. Urgensi Penetapan Waktu Pembagian Harta Warisan**

Penentuan waktu pembagian harta warisan dianggap penting. Ketentuan waris Islam menganjurkan pembagian warisan harus menyegerakan untuk dilaksanakan karena, dikhawatirkan terjadi berbagai konflik internal dalam keluarga atau harta warisan yang nilai atau jumlahnya tidak akan sama apabila tidak disegerakan. Sebab, harta peninggalan biasanya tidak hanya berupa uang saja, namun bisa terdapat tanah atau bangunan atau barang yang memiliki nilai. Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan kata lain, harta seseorang tidak beralih (dengan pewarisan) seandainya dia masih hidup. Hal ini sejalan dengan penjelasan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf a dan b, yaitu: a. “Hukum

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.” b. “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”<sup>11</sup> Dengan adanya ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres No.1 Tahun 1991 tersebut dapat dijelaskan bahwa hukum kewarisan dalam Islam terjadi apabila pewaris yaitu orang yang dinyatakan meninggal dunia dan memiliki harta peninggalan untuk diberikan kepada ahli waris yang memiliki hak untuk menjadi ahli waris terhadap bagianbagiannya yang telah ditentukan.

Keterangan yang didapat penulis dalam penelusuran awal terhadap keterangan mengenai waktu pembagian harta warisan dalam Kompilasi Hukum Islam yang selajutnya disebut KHI, penulis tidak menjumpai penjelasan yang terperinci mengenai ketentuan waktu pembagian harta warisan kapan harus dilakukan oleh ahli waris, penulis hanya menemukan keterangan terkait tahapan-tahapan untuk bisa sampai kepada pembagian harta warisan. Hal ini berarti bahwa KHI hanya menjelaskan secara garis besar terkait pembagian harta warisan baru dapat dilaksanakan ketika adanya pewaris meninggal dunia dan setelah melunasi hak-hak yang berkenaan dengan harta yang ditinggalkan oleh mayit.<sup>12</sup> Hak-hak tersebut adalah

<sup>11</sup> *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, pasal 171 huruf a dan b.

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 78.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengurusan jenazah pewaris, pelunasan hutang pewaris, pelunasan wasiat.<sup>13</sup> Setelah ketiga hal tersebut ditunaikan, sisa harta yang masih ada baru kemudian dibagikan kepada ahli waris.<sup>14</sup> Menganalisa keterangan yang telah disebutkan di atas, bahwa terkait kepastian waktu pembagian harta warisan tidak terukur secara pasti dalam Kompilasi Hukum Islam, misalnya 10 hari, atau setelah 20 hari meninggalnya pemilik harta, artinya KHI tidak menentukan batas waktu yang konkrit terhadap praktik pembagian harta warisan. Hal ini akan sangat membuka peluang kepada ahli waris untuk menunda pembagian harta warisan dan bahkan tidak melakukan pembagiannya.

### C. Implikasi Tidak Ditetapkannya Waktu Pembagian Harta Warisan

#### 1. Dampak Positif Tidak Ditetapkannya Waktu Pembagian Harta Warisan

Berbicara tentang dampak positif tidak ditetapkannya waktu pembagian harta warisan, dari analisa yang telah penulis buat melalui keterangan referensi yang ada maka dalam sub bab ini penulis dapat sebutkan beberapa hal saja, diantaranya adalah:

*Pertama*; Ahli waris yang akan membagikan harta peninggalan pewaris atau tentunya sangat leluasa untuk mempraktekkan pembagian harta warisan, kapanpun ia menghendakinya dapat dilakukannya, hal ini dikarenakan tidak adanya satu kepastian hukum terkait waktu pembagian harta warisan yang mengatur secara pasti. Penulis menilai ini merupakan

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 102.

<sup>14</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adilatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikri, 2004), juz 9, hal. 225.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

salah satu dampak positif ketika waktu pembagian harta warisan tidak ada ketentuannya.

*Kedua:* Memberi peluang untuk membagi harta peninggalan dengan cara lainnya, tidak mesti dengan jalan kewarisan, karena apabila waktu pembagian harta warisan tidak ditetapkan dan waktu yang telah ditetapkan tersebut harus dijadikan sebagai ketetapan yang mesti dipakai dalam proses pembagian harta warisan, tentu akan muncul keinginan dari pemilik harta untuk membagi-bagi harta di masa ia hidup dengan menggunakan model hibah, sehingga pembagian harta warisan tidak berjalan dengan baik, sesuai dengan instruksi yang terdapat dalam *nash*.

## 2. Dampak Negatif Tidak Ditetapkannya Waktu Pembagian Harta Warisan

Dampak negatif terhadap permasalahan tidak adanya ketentuan waktu pembagian harta warisan, penulis dapat sebutkan beberapa hal saja, diantaranya adalah:

*Pertama;* Tidak adanya aturan baku yang tentunya sangat dibutuhkan untuk mendongkrak agar suatu ketetapan hukum bisa berjalan dengan baik, maka agar suatu hukum dapat berjalan sesuai harapan, tentunya sangat diperlukan suatu aturan yang mengikat. Ketika aturan yang mengikat tidak ada dalam ketentuannya, maka secara kajian ilmiahnya dipastikan bahwa hukum tersebut tidak akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan memperhatikan kepada kehidupan sehari-hari saja, bahwa apapun yang akan kita kerjakan tidak ada keinginan untuk dilakukan kecuali adanya pendongkrak yang

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengharuskan untuk dilakukan pekerjaan tersebut, hal yang sama juga sebagai bukti untuk menguatkan teori yang disampaikan penulis, bahwa secara kehidupan kenapa manusia mau berlomba dalam ujian sekolahnya, ini dikarenakan adanya suatu pemberian yang disediakan sekolah untuk para sang juaranya. Artinya salah satu faktor terbesar ia bersungguhsungguh dalam belajarnya karena adanya pendongkrak yang disebutkan penulis sebelumnya. Sama halnya dengan waktu pembagian harta warisan, apabila tidak adanya ketetapan hukum yang pasti kapan ia harus dilakukan, apakah di awal kematian seseorang ataukah di waktu-waktu lain yang menjadi ketetapannya, kalau tidak ada aturan yang baku terkait permasalahan yang disebutkan, maka tentu akan bias kepada objek hukumnya atau *mukallafnya*. *Mukallaf*, dalam hal ini adalah ahli waris, tentu tidak akan mempraktekkan pembagian harta warisan, mengingat tidak adanya ketentuan dari *Syara'*.

*Kedua;* Berlarutnya proses pembagian harta warisan. Hal ini disebabkan tidak adanya ketentuan waktu untuk melakukan proses pembagian harta warisan. Ketika harta yang ditinggalkan tidak dibagi-bagi dalam waktu lama, secara kajiannya maka akan menimbulkan problematika lanjutannya. Salah satunya adalah akan terjadinya kasus *munaskhah*, walaupun sudah adanya cara penyelesaiannya untuk kasus yang disebutkan penulis, akan tetapi dalam pandangan penulis, hal ini juga dipandang tidak baik, karena dalam menyelesaikan kasus tersebut tentu akan membuat rumit atau kesulitan untuk keluar dari sengketa harta

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

warisan yang sudah berlarut sampai kepada generasi ke empat bahkan sampai generasi ke lima atau lebih dari itu.

*Ketiga;* Terjadinya penumpukan harta pada salah satu ahli waris. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 188:<sup>15</sup>

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.*

Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

<sup>15</sup> Departemen agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2009).



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini terjadi apabila waktu pembagian harta warisan tidak ditetapkan karena secara naluri manusia, yang menginginkan harta, ia akan berupaya bahkan dengan segala caranya untuk mendapatkan harta, tentu tidak terlepas dalam hal ini adalah harta warisan, apabila waktu pembagian harta warisan tidak ditetapkan, kemungkinan-kemungkinan yang disebutkan penulis tersebut, sangat berpeluang untuk terjadi.

*Keempat*; Hilangnya bukti-bukti otentik harta, karena lamanya atau penundaan terhadap pembagian harta peninggalan penulis menilai sangat besar peluang terjadinya pengkaburan terhadap harta, karena secara naluriah manusia yang cinta akan harta tentunya ia akan menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan harta yang ia inginkan. Dalam pandangan penulis salah satu yang berpeluang untuk mengkaburkan data otentik pada harta semisal surat kepemilikan harta itu dapat terjadi apabila harta peninggalan yang merupakan milik pewaris kemudian ia meninggal dunia dan tidak dibagi-bagi kepada yang berhak. Tidak terjadinya pembagian harta warisan karena tidak adanya ketetapan waktu pembagian harta warisan. Hal ini sangat berkemungkinan terjadinya pengkaburan keotentikan kepemilikan harta, tawaran jalan keluar yang bisa ditawarkan penulis adalah perlu adanya ketentuan waktu yang baku untuk proses pembagian harta warisan, sehingga akan mengharuskan ahli waris yang merupakan estafet pelanjut kepemilikan harta warisan tersebut untuk membagi harta peninggalan milik orang tuanya. Dalam al-Qur'an telah dijelaskan secara rinci tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewarisan untuk dilaksanakan oleh seluruh umat Islam diseluruh dunia.<sup>16</sup> Ilmu faraid memiliki peran yang sangat penting dalam hal kewarisan, tanpa pengetahuan mengenai mawaris maka akan terjadi pertikaian yang terjadi diantara para ahli waris sepeninggal pewaris.

#### D. Rekomendasi Waktu Pembagian Harta Warisan

1. Mengikuti waktu yang telah ditetapkan oleh KHI walaupun masih secara implisit atau tersirat pada pasal 175, yang mengatakan bahwa waktu pembagian harta warisan dibagi setelah proses penyelenggaraan jenazah, pembayar hutang yang berkenaan dengan harta peninggalan, wasiat dan lain sebagainya. Artinya penulis dalam rekomendasinya untuk waktu pembagian harta warisan yang akan dilakukan oleh masyarakat Indonesia, perlu memperhatikan hal-hal yang telah disebut di atas, apabila kewajiban di atas telah dilaksanakan, maka pada saat itulah ahli waris membagi harta warisan. Waktu pembagian harta warisan sangat terikat erat dengan hak-hak yang harus ditunaikannya sebelum proses pembagian harta warisan dipahami bahwa harta warisan baru akan dibagi ketika hak-hak tersebut sudah ditunaikan oleh ahli waris.
2. Menggunakan masa 'iddah perempuan yang meninggal suaminya. Dalam keterangan yang didapati dari referensi fiqih. Bahwa masa 'iddah perempuan adalah adalah tiga bulan sepuluh hari (4 bulan + 10 hari). Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 234:<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, ( Jakarta: Pranada Media, 2008), hal. 205.

<sup>17</sup> Departemen agama RI, *Al- Quran dan terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2009).

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٢٤﴾

Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila Telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Hemat penulis, waktu ini juga sangat tepat untuk dijadikan pijakan menetapkan waktu pembagian harta warisan, alasan yang bisa penulis sampaikan, bahwa ketika istri yang ditinggal ingin melanjutkan kehidupan berikutnya dengan suami yang barunya, maka di sini sangat perlu pemisahan harta peninggalan suaminya yang pertama, sehingga tidak terjadi percampuran antara harta yang ia usahakan dengan suami sebelumnya, dan dalam kehidupan lanjutanya dengan suami yang barunya apabila dikaruniakan keturunan berikutnya, tentu tidak akan terjadinya percampuran harta.

3. Waktu yang di praktekkan oleh masyarakat, berpijak pada kaidah *al-'aadah muhakkamah*, maksudnya adalah adat itu menjadi hukum. Tentunya adat yang dimaksud dalam tulisan ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum *syara* '.

Dalam masyarakat adat yang di Indonesia, tentu untuk praktek pembagian harta warisan dilakukan dengan tradisi atau kebiasaan kenduri njuhan, ratusan, dan tahunan. Artinya di sebagian tempat atau daerah yang ada di Indonesia, pembagian harta warisan masih memperhatikan kepada hari-hari kenduri selamatan yang dibuat oleh masyarakat setempat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.